

**PERKEMBANGAN LEMBAGA BIN ROHTAL
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
(1999-2010)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1)
pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**INDILLAH SILVI RIVYANTI
2006/73565**

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

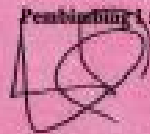
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perkembangan Lembaga Bin Roslial Di
Kepolisian Daerah Sumatera Barat (1999-2019)
Nama : Indillah Silvi Riviyanti
Nim/Bp : 73565/2006
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2013

Disetujui oleh :

Pembimbing I :



Drs. Esmi Hardi, M.Hum
NIP. 196703041993031003

Pembimbing II :



Abdul Salam, S.Ag., M.Hum
NIP. 1972012120080121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sejarah



Hendra Naldi, S.S., M.Hum
NIP. 196909301996031001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 1 Februari 2013*

PERKEMBANGAN LEMBAGA BIN ROHITAL DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA BARAT (1999-2010)

Nama : Indillah Sibi Riviyaati
Nim/EP : 73565/2006
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2013

Tim Penguji Skripsi

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Etni Hardi, M.Hum

Sekretaris : Abdul Salim, S.Ag. M.Hum

Anggota : Dr. Ernawati S.S, M.Hum

Drs. Bustaman, M.Pd

Drs. Zul Asri, M.Hum







ABSTRAK

Indillah Silvi Riviyanti. Perkembangan Lembaga Bin Rohtal Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat 1999-2010. **Skripsi**. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2013.

Lembaga Bin Rohtal di Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki peranan penting bagi pembinaan anggota Polri khususnya di Sumatera Barat, didalam menjalankan tugas pokoknya sehari-hari sebagai anggota Polri. Lembaga Bin Rohtal itu sendiri memiliki fungsi dan tugas dalam pembinaan rohani dan mental anggota Polri, dimana anggota Polri dituntut senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan Negara serta sebagai mitra, pelayan dan pengayom masyarakat khususnya, perlulah Lembaga Bin Rohtal sebagai alat dan pembinaan kontrol prilaku anggota Polri agar tidak menyimpang dari peraturan dan tugas pokok Polri.

Penelitian ini dapat dikategorikan termasuk jenis penelitian sejarah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menginterpretasi suatu peristiwa pada suatu objek. Penelitian ini digunakan metode penulisan yang terdiri atas empat tahap yakni tahap pertama adalah heuristik merupakan tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber data sejarah baik primer maupun sekunder. Tahap kedua adalah kritik sumber yakni merupakan tahap mengolah data atau menganalisa sumber informasi. Tahap ketiga adalah analisis sintesis dan menginterpretasikan informasi yang telah di seleksi. Tahap keempat adalah penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya dalam bentuk penulisan ilmiah yaitu skripsi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Bin Rohtal dalam perkembangannya mengalami penurunan, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya Lembaga Bin Rohtal, jadi tidaklah heran jika saat ini banyak anggota Polri yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Polisi dalam menjaga keamanan Negara serta mitra, pelayan dan pengayom masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa Selalu menganungrahkan kekuatan lahir dan bathin, petunjuk, serta keridhoannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perkembangan Lembaga Bin Rohtal Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat (1999-2010)". Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Drs. Etmi Hardi, M.Hum sebagai pembimbing I dan Abdul Salam, S.Ag. H.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulisan juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan do'a, moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta adik tersayang yang telah memberikan dorongan semangat dalam perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.

3. Bapak Hendra Naldi, S.S, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah
4. Terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, Drs. Bustamam, M.Hum, dan Ibu Dr. Erniwati, M.Hum selaku Tim Penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang.
6. Semua informan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman yang turut membantu memberikan semangat dan motifasi hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis khususnya. Atas motivasi dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
1. Studi Relevan	10
2. Kerangka Teori	12
E. Metode Penelitian	17
BAB II GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK	
INDONESIA	19
A. Kepolisian Pada Zaman Penjajahan Belanda	21
B. Kepolisian Pada Zaman Penjajahan Jepang	22
C. Kepolisian Di Indonesia Setelah Kemerdekaan	24
1. Kepolisian Jawatan Tersendiri 1945-1969	24
2. Integrasi Polri Ke Dalam ABRI 1969-1999	27
3. Pemisahan Polri Dari ABRI 1999-sekarang	31
D. Polisi Indonesia Mandiri	34
BAB III KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT.....	38
A. Lahirnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat	39
B. Kepolisian Sumatera Barat Dalam Lintas Sejarah	45
1. Masa Revolusi Fisik	45
2. Era Orde Baru	48
3. Era Reformasi	49

BAB IV DINAMIKA BIN ROHTAL DALAM SEJARAH KEPOLISIAN

SEMATERA BARAT	51
A. Lahirya Lembaga Bin Rohtal	51
1. Pengertian Bin Rohtal	51
2. Latar Belakang Lahir	53
3. Hakekat Pembinaan Mental	54
4. Tujuan Lembaga Bin Rohtal	55
5. Komponen Pembinaan Mental	58
6. Azas-azas Pembinaan Mental	60
7. Metode Pembinaan Bin Rohtal	61
B. Perkembangan Lembaga Bin Rohtal	62
1. Periode 1999-2002	68
2. Periode 2002-2004	72
3. Periode 2004-2008	76
4. Periode 2008-2010	81
BAB V KESIMPULAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia diwarnai oleh gejolak perjuangan menuju cita-cita nasionalnya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di dalam sejarah perjuangan itu dikenal etos-etos kepahlawanan yang dilandasi dengan nilai-nilai mental yang mengandung unsur-unsur kerohanian, mental ideologi dan tradisi perjuangan yang mengilhami bangsa Indonesia untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan Negara asing.

Pengalaman sejarah perjuangan bangsa yang panjang tersebut, memberikan inspirasi kepada pimpinan Angkatan Perang tentang perlunya penanaman tekad atau niat suci sebagai momentum dalam memelihara semangat dan jiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Demi mempertahankan kedaulatan Negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ini.

Dibawah pimpinan Panglima Besar Jendral Sudirman, atas nama rekan-rekan mengucapkan sumpah yang intinya sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan serta sanggup taat dan tunduk pada

pemerintah Negara yang menjalankan kewajiban UUD Negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari peristiwa sumpah itu, unsur pembinaan mental secara terus menerus dipelihara dan berkiprah dalam perjalanan TNI-Polri guna mendukung tetap tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di dalam setiap peristiwa perjuangan TNI-Polri, unsur pembinaan mental melekat, sehingga nilai-nilai kejuangan senantiasa terpatrit dalam dada setiap prajurit. Sejarah telah mencatat keberhasilan TNI-Polri dalam mengemban tugas-tugas bangsa dan negara sangat ditentukan oleh nilai-nilai kondisi dan sikap mental yang mampu mewujudkan semangat kejuangan yang tinggi.¹

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah membangkitkan naluri kejuangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan naluri kejuangan² tersebut perlu semakin diarahkan, sehingga terlahirlah wadah perjuangan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, kemudian pada tanggal 7 Januari 1946 berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (tetap disingkat TKR), pada tanggal 25 Januari 1946 berubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), kemudian tanggal 3 Juni 1947 disempurnakan menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan menjadi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) tahun 1969 dan

¹ Pinaka Wiratama Edisi Khusus 2002 hal 3.

² Naluri kejuangan yakni sikap mental semangat juang anggota Polri berdasarkan nilai-nilai luhur dan tradisi seperti keikhlasan, rela berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

akhirnya tahun 1999 kembali lagi menjadi TNI-Polri, hingga saat ini. Dalam wadah ini para pemuda mewujudkan sikap juang rela berkorban, pantang menyerah dan mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.³

Dengan tekad dan semangat yang bulat para pemuda saling bahu-membahu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat yang menggelora itu menjiwai pimpinan tantara untuk bersumpah. Sumpah itu terjadi pada tanggal 25 Mei 1946 pada saat pelantikan anggota Pimpinan Tentara yang berbunyi: a)sanggup mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan, b)sanggup taat dan tunduk pada Pemerintah Negara Republik Indonesia yang menjalankan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebulat-bulatnya.⁴

Sumpah ini selanjutnya dijadikan titik tolak dalam membina mental prajurit. Setelah diikrarkan Sumpah Anggota, Pimpinan Tentara Pangsar Jenderal Sudirman segera membentuk Pejabat Pendidikan Keagamaan Tentara untuk kesatuan-kesatuan yang ada di Pulau Sumatera.⁵

Pada tahap berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor 59/MP/1949 tanggal 3 November 1949 ditetapkan berdirinya Bagian

³ *Ibid* Pinaka Wiratama, 2002 hal 3-4.

⁴ *Ibid* hal 4

⁵ *Ibid*

Urusan Agama pada staf “A” Kementerian Pertahanan RI Bagian Urusan Agama. Sesuai dengan Penetapan Sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat Nomor: 113/Pnt/SA/50 tanggal 23 Februari 1950 Bagian Urusan Agama diganti namanya menjadi Dinas Agama di bawah naungan Markas Basar Angkatan Darat.⁶

Perkembangan selanjutnya memasuki tahun 1951 Dinas Agama diganti namanya Jawatan Agama yang struktur organisasinya sama dengan pada masa Dinas Agama. Sementara itu instruksi KASAD No: 37/KSAD/Instr/52 tanggal 20 Maret 1952 Staf “A” Angkatan Darat namanya diganti menjadi Ajudan Jenderal. Dengan adanya perubahan ini maka secara otomatis Jawatan Agama dibina Ajudan Jenderal. Kemudian berdasarkan Surat Penetapan Kepala Ajudan Jenderal Nomor: 305/Pnt/Ajen/1952 tanggal 18 April 1952 Jawatan Agama diganti namanya menjadi Cors Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat di singkat (CPRAD). Berdasarkan Keputusan KSAD Nomor: 288/KSAD/Kpts/1955 CPRAAD diubah menjadi Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat (PRAD).⁷

Sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi pada waktu itu, dirasa perlu untuk semakin mengintensifkan pembinaan moril dan moral prajurit. Untuk itu melalui Penetapan KSAD Nomor: Tap/05 tanggal 5 Agustus 1958 Organisasi Itrohad diubah menjadi Pusat Rawatan Rohani (Pusroh). Selanjutnya mengikuti perkembangan organisasi Angkatan Darat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad), maka dengan Penetapan Menpangad Nomor:10-90 tanggal

⁶ *Op.,Cit* Pinaka, hal 4

⁷ *Ibid* hal 4-5

17 Maret 1964 ditetapkan organisasi dan Pusroh Angkatan Darat yang didalamnya antara lain dijelaskan, yang maksud Rawatan Rohani Angkatan Darat adalah “suatu fungsi khusus dalam Angkatan Darat yang meliputi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertinggi moril dan moral anggota Angkatan Darat berdasarkan agama”.⁸

Untuk meningkatkan dan mengembangkan tugas-tugas pembinaan rohani, maka Pusroh AD diubah menjadi Dinas Rawatan Rohani Angkatan Darat (Disroh AD) melalui Keputusan KSAD Nomor: Kep/600/X/1970 tanggal 24 Oktober 1970. Pada tahun 1976 dalam jajaran TNI AD terjadi reorganisasi dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menhankam Pangab Nomor: Kep/18/IV/1976 tanggal 28 April 1976 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI AD. Kemudian oleh KSAD dikeluarkan Keputusan Nomor: Skep/1246/IX/1976 tanggal 20 September 1976 tentang pembantukan Dinas Pembinaan Mental TNI AD (Disbintalad) sebagai penggabungan dan penyempurna Disroh Is, Disroh Prot, Disroh Kath, Disroh Hinbud AD dibawah satu atap.⁹

Berdasarkan keputusan tersebut Disbintalad dalam organisasi TNI AD menjadi salah satu Badan Pelaksana Pusat. Tugas pokok Disbintalad adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membina mental

⁸ *Ibid* hal 5-6

⁹ *Ibid* hal 6

spiritual personel ABRI khususnya dan keluarga pada umumnya sehingga dapat mempertinggi jiwa keprajuritan dan semangat juang.¹⁰

Seiring perkembangan reformasi tahun 1998¹¹ dan reformasi ditubuh ABRI tahun 1999 yang pada akhirnya terjadi pemisahan TNI-Polri, sehingga secara organisasi pembinaan rohani dan mental berada dibawah naungan instansi TNI-Polri. Tanggal 1 April 1999 adalah momen penting dalam pemisahan Polri dari ABRI. Pemisahan adalah keharusan reformasi yang bertujuan untuk menghapus norma, watak dan praktik militerisme dalam tubuh kepolisian (demiliterisasi).¹²

Warisan militerisme pada sistem organisasi kepolisian yang dievaluasi ialah mencakup budaya perilaku atau watak kekerasan, birokrasi yang tertutup, sampai pola relasi atasan bawahan yang sentralistik.¹³ Setelah pemisahan TNI-

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabintal Korem 032 Wirapraja, Kapten Inf. Syamsuwarno hari jum'at tanggal 29 Juni 2012 di Korem 032 Wirapraja Kota Padang.

¹¹ Presiden Soeharto tidak mampu mempertahankan pemerintahannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1989. Pada tanggal itu pula, Wakil Presiden Burhanuddin Jusuf Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soeharto. Perubahan pemerintahan yang terjadi turut mengubah karakter politik Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Perubahan sosial-politik yang terjadi, berdampak besar pada kehidupan politik nasional. Hal ini kemudian sangat mempengaruhi pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan nasional, termasuk di dalamnya pembinaan ABRI (TNI dan Polri) ke arah yang lebih profesional.

¹² Kontras, Imparsial, IDSPS, Praxis, Propatria, Kontras Aceh, P2D, ICJR. *11 Tahun Pemisahan Polri dari ABRI/TNI : Prioritaskan Pengawasan Eksternal Polri*. Jakarta : 31 April 2010. Lihat juga Opini. *Satu Dasawarsa Pemisahan TNI-Polri*. 23 Mei 2010. Serta liat juga Surat Kabar Pikiran Rakyat. *Kilas Balik Pemisahan TIN-Polri*. 25 februari 2005, hal 7.

¹³ Disahkan dalam produk legitimasi yakni Keputusan Presiden B.J Habibie No 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI – Polri, lalu dikuatkan oleh TAP MPR XI/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh TAP MPR VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI dan Polri diatur secara operasional melalui UU

Polri, terjadi perubahan yang berimplikasi kepada susunan organisasi ditubuh Kepolisian itu sendiri yang mengalami perubahan beberapa kali dalam kurun waktu satu dasawarsa.

Pada tahun 2002 lahirnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Bab II susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bab V Pembinaan Profesi, dimana kedudukan Lembaga Bin-Rohtal sangat dibutuhkan dalam pembinaan Personil Polri dan PNS Polri, sampai lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, sehingga Lembaga Pembinaan Rohani dan Mental (Bin-Rohtal) berganti menjadi Lembaga Subbagian Rohani dan Jasmani (Subbagrohjas).¹⁴

Polri berdiri tidak lama setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, didirikan secara spontan di daerah-daerah termasuk di Sumatera Barat pada tanggal 21 Agustus 1945 dan membentuk struktur organisasi, dimana dalam struktur organisasi tersebut terdapat Bintel (Bimbingan Mental) yang saat itu masih

No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No 34/2004 tentang TNI. Bahkan secara tersirat Pemisahan Peran TNI – Polri masuk dalam konstitusi UUD 1945 (Amandemen II) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3 dan 4. Baca juga buku Polisi Perjuangan dan Polisi Masyarakat karya Hasril Chaniago,dkk.

¹⁴ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 48 yang khusus membahas tentang pembinaan kesejahteraan personel yang meliputi pembinaan rohani, jasmani, dan mental.

dibawah naungan ABRI, walaupun terjadi pemisahan TNI-Polri pada tahun 1999 dan struktur organisasinya, Bintel berganti menjadi Lembaga Bin Rohtal langsung dibawah organisasi Polri dan Kepolisian di daerah-daerah, termasuk Kepolisian Sumatera Barat, namun tugas dan fungsi dalam pembinaan anggota tidak jauh berbeda sebelum pemisahan TNI-Polri.

Pentingnya penelitian tentang pembinaan rohani dan mental ini di lakukan, karena pada dasarnya anggota polisi tidak luput dari kesalahan dalam melaksanakan tugas. Banyak tayangan televisi maupun surat kabar memberitakan anggota Polisi yang melanggar hukum antara lain beking perjudian dan diskotik, pungutan liar (pungli), pengedar narkoba, dan lain sebagainya. Dari pembinaan yang dilakukan, sejauh mana hasilnya? Belum ada datanya. Inilah salah satu motifasi penulis mengangkat penelitian dengan judul ***“Perkembangan Lembaga Bin Rohtal di Kepolisian Daerah Sumatera Barat 1999-2010”***. Ketertarikan penulis membahas Lembaga Bin-Rohtal di Polda Sumbar ini karena sepengetahuan penulis belum pernah diteliti orang, sementara keberadaan Lembaga Bin Rohtal ini begitu penting untuk memahami sejarah berdirinya Lembaga Bin Rohtal di tubuh Kepolisian terutama Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami masalah, maka penulis merasa perlu untuk memberi batasan masalah yang akan diteliti. Batasan spasial dalam penulisan ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Barat, karena memudahkan penulis dalam mengolah dan menganalisis

data. Batasan temporal untuk penelitian diambil tahun 1999-2010. Tahun 1999 dijadikan batasan awal karena pada waktu pemisahan Polri dari TNI, dimana berdirinya Lembaga Bin Rohtal di Kepolisian baru ada dan berdiri sendiri setelah berpisah dari TNI, sedangkan tahun 2010 dijadikan batasan akhir karena pada tahun itu keberadaan Lembaga Bin Rohtal secara struktural berganti menjadi Lembaga Bin Rohjas dengan sistem lembaga yang tidak beda jauh dengan Lembaga Bin Rohtal.

Agar pemasalahan lebih terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yakni: “Bagaimana perkembangan Lembaga Bin-Rohtal di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan dampaknya terhadap pembinaan rohani dan mental anggota Polri di Polda Sumatra Barat?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan dampak adanya Lembaga Bin Rohtal dalam pembinaan rohani dan mental anggota-anggota Polri maupun PNS di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Manfaat

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada Polda Sumatera Barat untuk mengambil kebijakan pengembangan Bin Rohtal selanjutnya. Sebagai literatur bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Negeri

Padang pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Sejarah khususnya. Dapat memberikan masukan atau input yang membangun bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Lembaga Bin-Rohtal di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Serta sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

D. Kajian Pustaka

1. Studi Relevan

Memang banyak yang membahas tentang lembaga, namun belum menyentuh lembaga Bin-Rohtal di Polda Sumatra Barat. Adapun literatur yang membahas tentang lembaga dapat dilihat dalam karya Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A, Lc, dalam karyanya *Struktur Masyarakat*, menguraikan panjang lebar tentang pengertian lembaga, lembaga dalam sosiologis, dan organ-organ yang menjalankan fungsi dalam masyarakat. Dalam buku tersebut Sarjono Soekanto menyimpulkan dari sudut pandang sosiologi dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan dari pada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Adapun skripsi yang membahas tentang Polisi salah satunya Margusna, *Azwir Nasution, Profil Seorang Polisi Pendakwah 1977-2012*. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2012. Skripsi ini

merupakan kajian biografi dengan memilih tokoh Azwir Nasution sebagai polisi pendakwah. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian tidak jauh berbeda dengan juru dakwah, yaitu sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar). Sebagai penegak hukum beliau punya kewenangan untuk menangkap dan memberi sanksi terhadap orang yang berbuat kejahatan dan maksiat, dan sebagai pendakwah beliau punya kewenangan memberikan arahan dan anjuran agar berbuat yang dilarang oleh hukum dan agama jangan dilakukan.

Skripsi lain tentang lembaga sosial diantaranya: Cosma Putra, *Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tahun 1982-1998*. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah. Fakultas Sastra. Universitas Andalas, 2010. Skripsi ini mencoba menjelaskan tentang perkembangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mulai dari berdirinya lembaga bantuan hukum di Indonesia hingga berdirinya lembaga bantuan hukum di Sumatera Barat. LBH Padang merupakan kantor dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang. YLBHI berdiri pada tahun 1970 di Jakarta oleh Adnan Buyung Nasution dan Muktar Lubis. Di Padang Lembaga Bantuan Hukum berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 diprakarsai oleh Peradin Sumatera Barat dan kemudian Zahiruddin SH, terpilih sebagai Direktur LBH yang pertama.

Najmi, *Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) : Studi Kasus Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (1995-2008)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah. Fakultas Sastra. Universitas Andalas, 2009. Dalam skripsi ini penulis mencoba menjelaskan tentang

perkembangan LP2M tahun 1995 sebagai salah satu LSM yang berpusat di Kota Padang hingga tahun 2008 LP2M melakukan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan jaringan antar kelompok dengan membentuk satu kelompok dampingan besar yang di beri nama “Sarumpun Batuang”.

Titin Romaya Sari, *Perkembangan Yayasan Penyantun dan Pembina Anak Cacat Kota Bukittinggi (1986-2006)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah. Fakultas Sastra. Universitas Andalas, 2010. Menjelaskan tentang latar belakang YPPAC, perkembangan YPPAC tahun 1986-2006, bentuk pengelolaan aktivitas YPPAC dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial serta jenis pelayanan sosial yang dilaksanakan YPPAC Kota Bukittinggi, profil pemimpin, karyawan, guru, serta siswa yang ada di YPPAC.

Mengenai Lembaga Bin-Rohtal di Kepolisian Daerah Sumatra Barat penulis hanya mendapatkan buku pelengkap, dimana dalam buku tersebut hanya membahas tentang sejarah berdirinya Kepolisian Daerah Sumatera Barat, sedangkan mengenai berdirinya Lembaga Bin Rohtal beserta tujuan dan manfaatnya belum ada yang menulisnya. Itulah sebabnya penulis memilih tema ini sebagai bahan kajian skripsi ini.

2. Kerangka Teori

Pokok bahasan dalam skripsi ini membahas tentang sejarah perkembangan. Perkembangan adalah melihat perubahan berdasarkan dimensi waktu, dalam hal ini adalah perubahan di Lembaga Bin Rohtal Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lembaga antara lain diartikan sebagai: a) Asal mula (yang akan menjadi sesuatu) ; bakal (binatang, manusia, tumbuhan) ; b) bentuk (rupa,wujud) yang asli ; c) acuan ; ikatan (tentang mata cincin dsb) ; d) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyeledikan keilmuan atau melakukan suatu usaha ; e) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.¹⁵

Menurut Paul B. Harton (1999:244) “lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat di pandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia”.¹⁶

Lembaga Bin-Rohtal merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang bergerak di bidang keagamaan. Dalam buku beberapa pengarang menjumpai berbagai definisi tentang lembaga sosial. Leopold Von Weise dan Becker (1994:76) mendefinisikan “lembaga sosial yaitu jaringan proses antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya”.¹⁷

Robert Mac Iver dan C.H Page (1994:76) mendefinisikan “lembaga sosial yaitu prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat”.¹⁸ Mayor Polak

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1997:979 - 58

¹⁶ Paul B Harton, 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, hlm 244

¹⁷ Abdul Syani, 1994. *Sosiologi (Sistematika, Teori, dan Terapan)*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 76

¹⁸ *Ibid*

JBAF (1979:75) menyatakan bahwa “lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting”.¹⁹

Sarjono Soekanto (1982:76) menyimpulkan “menurut sudut pandang sosiologi dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan dari pada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya”.²⁰

Koentjaraningrat (1987:116) menyebut “lembaga sosial dengan istilah pranata sosial yaitu sistem norma-norma atau secara lengkapnya suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khususnya dalam kehidupan masyarakat”.²¹

Sugiono (2002:16) mendefinisikan “lembaga sosial sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, artinya hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi menciptakan harapan baru bagi perilaku individu. Harapan ini diwujudkan dalam peran-peran tertentu yang harus dihasilkan. Beberapa orang harus memainkan peran pemimpin sementara yang lain adalah pengikutnya”.²²

¹⁹ *Ibid* hlm 75

²⁰ Sarjono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali, hlm 76

²¹ Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Gramedia, hlm 116

²² Sugianto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, hlm 16

Di dalam suatu lembaga sosial terdapat proses yang dinamis, dimana hubungan antar manusia yang di dalamnya senantiasa berubah-ubah, tindakan setiap orang terhadap orang lain selalu berulang-ulang dan terkoordinasi, namun demikian dalam lembaga sosial tercermin pula suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Jadi, lembaga sosial disamping sebagai suatu kondisi yang dinamis, juga sebagai kondisi yang bersifat struktural.

Dalam lembaga sosial anggota-anggotanya tersusun (terstruktur) secara sistematis, masing-masing mempunyai status dan peran yang bersifat formal, masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (umum). Peran adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati suatu kedudukan sosial tertentu.²³ Senada dengan itu Bruce. J Cohen mendefinisikan “peran sebagai suatu yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

Mengenai pengaturan tata hubungan antar anggotanya yang ingin mengadakan hidup bersama dalam suatu lembaga, menurut J.O Hertzner (1994:112) memerlukan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut : “(1) Harus ada ukuran yang tetap dalam tata hubungan sosial yang dapat diterima oleh anggota-anggota kelompok (lembaga), (2) Harus ada kekuasaan atau otoritas yang mempunyai daya paksa dalam melakukan tata hubungan sosial, (3) Adanya pengaturan dan penyusunan individu-individu dalam kelompok-kelompok dan lapisan sosial tertentu yang menggambarkan adanya koordinasi dan subkoordinasi, (4) Anggota-anggota yang hidup dalam berbagai bidang, dapat

²³ Berry David, 1982. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, hlm 99

hidup dalam suasana harmonis, yang telah memberikan kepuasan, (5) Adanya tingkah laku yang telah merupakan standar itu disalurkan atau dipaksakan dengan mekanisme tekanan-tekanan sosial, menjadi suatu pola yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia.²⁴

Proses perkembangan dari lembaga-lembaga dinamakan “*institusionalisasi*” dan proses ini sesuai dengan apa yang dikatakan diatas lahirnya peraturan dan anggapan umum yang mengatur antar hubungan dan antara aksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Bin Rohtal adalah suatu badan atau lembaga di lingkungan Kepolisian yang bertugas melakukan pembinaan rohaniyah dan mental anggotanya. Pembinaan rohani ialah mempertinggi moral atau budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Adapun yang dimaksud dengan pembinaan mental Polri adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan dalam membentuk, memelihara, serta meningkatkan kondisi atau keadaan jiwa seseorang terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat, dan kondisi tertentu berdasarkan Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga Dokrin Hankamnas, yang meliputi pembinaan rohani, Cantiaji Cantikarma (Aji Karma)²⁵ serta pembinaan tradisi Polri.

²⁴ Abdul Syani. *Op.cit.* hlm 112

²⁵ Mabes TNI, 2000. *Sejarah TNI Jilid II (1950-1959)*. Jakarta: Pusat Sejarah Tradisi TNI, hlm 135

E. Metode Penelitian

Penelitian tentang *Perkembangan Lembaga Bin Rohtal di Kepolisian Daerah Sumatera Barat 1999-2010* ini dapat dikategorikan termasuk jenis penelitian sejarah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasi suatu peristiwa pada suatu objek. Dalam penelitian ini digunakan metode penulisan sejarah yang terdiri atas empat tahap.²⁶

Tahap pertama, yaitu *heuristik* merupakan tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber data sejarah, baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa dokumen dan arsip-arsip. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam bentuk buku-buku, artikel, makalah dan hasil-hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan sumber sekunder dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, antara lain di Lembaga Bin Rohtal Polda Sumatera Barat, Perpustakaan Polda Sumbar, Perpustakaan SPN Padang Besi, Perpustakaan Pusat UNP, Perpustakaan daerah Sumatera Barat. Untuk bahan pendukung, peneliti juga melakukan studi ke Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang, Perpustakaan FIS UNP, Labor Jurusan Sejarah UNP, perpustakaan Fakultas Sastra UNAND dan bahan-bahan dari internet.

Tahap kedua, adalah *kritik sumber* yakni merupakan tahap pengolahan data atau menganalisa sumber informasi. Tahap arsip atau dokumen dilakukan kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal yaitu pengujian otentitas (keaslian)

²⁶ Louis Gottschalk, 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, hlm 132

meterinya secara klinis dan labor, kritik ini tidak bisa dijalankan karena keterbatasan alat-alat dan pengetahuan penulis. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji reabilitas isi informasi sejarah yang terkandung didalamnya, dilakukan dengan cara cek silang melalui wawancara. Kedua tingkat pengolahan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyingkirkan bagian-bagian data yang tidak otentik dan kemudian menyimpulkan kesaksian yang bisa dipercaya dari bagian-bagian yang telah diseleksi dari data otentik. Wawancara dilakukan terhadap sasaran pembinaan bimbingan rohani dan mental di Polda Sumbar yaitu seluruh personel Polda Sumbar sebagai perorangan maupun secara kesatuan dan keluarga besar anggota kepolisian Polda Sumbar untuk mendapatkan kesaksian langsung dari mereka, dengan standar yang telah ditentukan.

Tahap ketiga, adalah *analisis sintesis dan menginterpretasikan informasi* yang telah diseleksi. Sumber-sumber sejarah yang telah lewat kritik. Sumber dipilah-pilah sehingga diperoleh butir-butir informasi yang dibutuhkan berupa fakta-fakta lepas yang kemudian dirangkai dan diolah sesuai pokok persoalan penelitian. Kemudian menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan yang otentik dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap data tersebut. Pada tahap ini adalah penyusunan data yang diperoleh berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan hubungan kausalitas (sebab-akibat).

Tahap keempat, adalah penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi satu kisah atau penyajian yang berarti, yaitu data yang terkumpul kemudian diolah dan ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah yaitu *Skripsi*.